BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian, dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai "pendidikan politik bagi pelajar (studi kasus sekolah legislasi DPD KNPI Kota Bandung)" peneliti menarik beberapa kesimpulan yang terdiri dari simpulan umum dan juga simpulan khusus.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Pelajar merupakan poros perubahan suatu bangsa dewasa ini. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelajar semakin menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelajar. Sejalan dengan perkembangan politik global yang semakin kuat dengan berwadahkan media sosial yang semakin giat membawa tantangan tersendiri dalam perubahan politik kebangsaan. Terorisme dan radikalisme semakin menjamur dalam media sosial sekan menjadi tantangan yang dapat merusak tatanan politik kebangsaan Indonesia. Pendidikan politik menjadi kebutuhan bagi pelajar sebagai dasar untuk menghadapi perkembangan politk yang membawa kemunduran bagi kehidupan bangsa Indonesia. Melalui sekolah legislasi yang diselenggarakan DPD KNPI Kota Bandung dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik generasi muda untuk mempersiapkan pelajar sebagai generasi melek politik, memiliki kesadaran dan tanggung jawab politik, serta memiliki karakter kepemimpina politik yang mampu membawa masyarakat menggapai perubahan yang lebih baik. Pelajar yang mampu berperan aktif dalam realitas politik kebangsaan berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman kehidupan politik Indonesia.

5.1.2 Simpulan Khusus

5.1.2.1 Sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung memberikan rasionalisasi politik bagi pelajar dengan cara; pertama, bidang pendidikan dan bidang sosial politik DPD KNPI Kota Bandung bekerja sama dalam membentuk program sekolah legislasi dalam bentuk *talkshow* yang menjadi ruang membentuk keterbukaan pemikiran bagi seluruh

elemen untuk mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara, khususnya pelajar yang menjadi tonggak perjuangan bangsa di masa depan. Kedua, sekolah legislasi mengangkat fenomena politik yang riil sehingga hal ini menggugah peserta untuk mampu berpikir jernih dalam menyikapi fenomena politik. Ketiga, sekolah legislasi memberikan pemahaman mendasar terkait perilaku politik yang rasional. Bukan hanya berpandangan politik praktis semata namun menganalisa realitas nilai yang ada dalam fenomena politik.

5.1.2.2 Sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung dalam membentuk pemahaman pentingnya pendidikan politik bagi pelajar dengan cara; pertama, memberikan sarana pendidikan politik untuk menciptakan pelajar yang mampu menjadi aktor politik yang bertanggung jawab serta mampu mawas diri dan lingkungannya sehingga mampu menciptakan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyakat yang lebih baik melalui diskusi ilmiah yang meliputi materi-materi wawasan kebangsaan dan empat pilar serta melakukan studi lapangan terhadap lembaga negara. Kedua, sekolah legislasi dilakukan secara kontinu sehingga memberikan upaya pembelajaran yang berkelanjutan dengan materi-materi yang berjenjang dan bertahap.

5.1.2.3 Sekolah legislasi yang diadakan oleh DPD KNPI Kota Bandung membentuk karakter kepemimpinan politik bagi pelajar dengan cara; pertama, pembelajaran melalui materi dan metode dalam sekolah legislasi dilakukan melalui diskusi memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan gagasan. Hal ini dapat membangun keberanian dan pembentukan kepemimpinan. Kedua, sekolah legislasi memberikan pemahaman politik kebangsaan yang dapat berdampak pada gaya kepemimpinan pelajar di masa depan. Ketiga, kunjungan ke DPR/MPR untuk menelaah proses persidangan merupakan bagian dari pembelajaran dalam membentuk kepemimpinan. Dalam proses ini peserta dapat melihat secara langsung perilaku kepemimpinan dari para anggota dewan.

5.2 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut.

5.2.1 Pendidikan politik bagi pelajar melalui sekolah legislasi yang dilakukan oleh DPD KNPI Kota Bandung akan lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku politik pelajar apabila proses pendidikan politik dilakukan secara berjenjang dan adanya tindak lanjut dari setiap sekolah legislasi yang sudah diselenggarakan.

5.2.2 Pendidikan politik bagi pelajar melalui sekolah legislasi yang berupa kunjungan ke gedung MPR RI akan lebih tersampaikan dengan baik apabila panitia memberi stimulus yang intens atau pengetahuan dasar terlebih dahulu untuk memancing rasa ingin tahu pelajar saat proses pembelajaran secara langsung terkait politik anggota dewan, hal ini akan membuat peserta lebih siap menerima materi.

5.2.3 Penyelenggaraan sekolah legislasi yang dilakukan oleh DPD KNPI Kota Bandung akan lebih baik apabila terdapat kurikulum yang menjadi patokan materi dalam setiap bentuk pendidikan politik bagi pelajar. Hal ini akan memudahkan panitia dalam merancang materi pendidikan politik dan mencapai tujuan pendidikan politik lebih optimal dan tepat sasaran.

5.2.4 Para pelajar akan semakin paham tentang pendidikan politik apabila mengikuti program sekolah legislasi secara kontinu, acara demi acara, agar mampu menganalisis lebih dalam hingga dapat mengambil sikap politik.

5.3 Rekomendasi

Setelah menyampaikan simpulan dan implikasi penelitian ini, selanjutnya peneliti rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bahan masukan terhadap penggunaan media film pendek untuk kedepannya. Adapun rekomendasi yang diberikan peneliti sebagai berikut.

5.3.1 Bagi Lembaga UPI

a. UPI harus mendukung penyelenggaraan pendidikan politik bagi mahasiswa melalui fasilitas yang memadai bagi terselenggaranya pendidikan politik pad organisasi-organisasi kemahasiswaan seperti kemudahan akses perijinan dan dukungan materil. Hal ini diyakini bahwa penyelenggaraan

pendidikan politik bukan hanya kewajiban organisasi kepemudaan melainkan secara mendasar bagian dari perguruan tinggi.

b. UPI sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mampu memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk giat dalam mengikuti rangkaian pendidikan politik yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikann formal dalam pembelajaran maupun ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan.

5.3.2 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

a. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan dijadikan referensi untuk pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan khususnya dalam ranah politik sehingga mampu memberikan stimulus bagi mahasiswa lainnya untuk melanjutkan penelitian pendidikan politik.

b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan merupakan lembaga pendidikan yang konsen terhadap pengembangan pendidikan politik. Diharapkan departemen Pendidikan Kewarganegaraan mampu bersinergi dan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi pelajar. Juga perlu adanya dorongan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari pengembangan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan.

c. Departemen pendidikan kewarganegaraan harus mampu memberikan pemahaman mendasar terkait pentingnya pendidikan politik sehingga banyak mahasiswa yang mampu memiliki pemahaman yang lebih luas dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan.

d. Kunjungan yang rutin dilakukan ke MPR RI sebaiknya segera dirutinkan kembali setelah pandemi. Lebih baik lagi ketika bisa berkunjung ke lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi *role model* bagi masyarakat khususnya generasi muda dalam pembelajaran dan pengembangan pendidikan politik demi mewujudkan generasi yang memiliki karakter kepemimpinan yang demokratis dan rasional dan berpolitik.

5.3.3 Bagi DPD KNPI Kota Bandung

a. Pendidikan politik merupakan ruh dalam kehidupan organisasi karena akan menciptakan kader yang mampu menjalankan organisasi ke depannya. Selain itu, DPD KNPI Kota Bandung sebagai bagian dari agen pendidikan politik dituntut semakin mengembangan kurikulum pendidikan politik yang lebih baik di kepengurusan berikutnya agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang lebih efektif dan menghasilkan kader-kader yang siap memperbaiki politik Indonesia di masa yang akan datang.
b. DPD KNPI Kota Bandung harus membuat informasi yang lebih terbuka kepada khalayak umum bukan hanya pada pelajar. Hal ini dikarenakan pemahaman politik pada kalangan tua masih dianggap kurang yang berdampak pada partisipasi kalangan tua dianggap tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan politik Indonesia.
c. DPD KNPI Kota Bandung harus mampu bersinergi dengan elemen lainnya baik dari pemerintah, organisasi kepemudaan, maupun organisai kemahasiswaan agar dapat mengembangkan program menjadi lebih baik dan mencakup seluruh kalangan.
d. DPD KNPI Kota Bandung harus mengembangkan pendidikan politik bukan hanya sebatas pada sekolah legislasi agar mampu meningkatkan kesadaran politik pelajar secara efektif.

5.3.4 Bagi Peserta Sekolah Legislasi

a. Para peserta sekolah legislasi harus mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan politik pasca sekolah legislasi agar memiliki pemahaman dan kesadara politik yang lebih luas
b. Para peserta dituntut untuk terus melakukan pengembangan diri sera mandiri baik melalui kegiatan membaca referensi maupun mengikuti kegiatan lainnya yang diadakan oleh organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
c. Para peserta harus mampu menularkan output dari kegiatan sekolah legislasi bagi masyarakat dalam lingkungannya masing-masing.

d. Para peserta harus mampu memberikan stimulus kepada pelajar maupun masyarakat umum terkait pentingnya pendidikan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5.3.5 Bagi Mahasiswa secara Umum

a. Mahasiswa merupakan agen perubahan masyarakat mencapai kemajuan. Selain itu juga dikategorikan sebagai pelajar yang memiliki tugas untuk melanjutkan estafet perjuangan politik kebangsaan di masa depan. Oleh karena itu mahasiswa harus menjadi garda terdepan sebagai agen pendidikan politik serta sebagai akademisi dituntut untuk memperdalam kajian keilmuan sehingga pendidikan politik semakin berkembang secara akademis maupun praksis.
b. Mahasiswa harus mampu berkontribusi secara nyata dalam penyelenggaraan pendidikan politik bukan hanya sebatas peserta melainkan sebagai penyelenggara dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
c. Mahasiswa harus lebih responsif terhadap fenomena politik yang berkembang dalam masyarakat.
d. Mahasiswa harus menjadi agen pendidikan politik bagi masyarakat luas.

5.3.6 Bagi peneliti selanjutnya

a. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya agar dapat memperkuat dan memperkaya khasanah keilmuan pendidikan politik.
b. Peneliti selanjutnya harus mampu responsif terhadap fenomena politik kebangsaan agar mampu menghasilkan karya yang mampu menjawab permasalahan politik kebangsaan.
c. Perlu adanya penguatan referensi internasional yang lebih banyak agar semakin memperkuat dasar keilmuan pendidikan politik.